

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data

4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian

Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi yang terletak di ujung selatan Pulau Sumatera, Indonesia, dengan luas wilayah sekitar 35.376,50 km². Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, Provinsi Lampung terdiri dari 15 wilayah administratif, yang meliputi 13 kabupaten dan 2 kota, serta 1 pemerintah provinsi. Provinsi ini memiliki potensi sumber daya alam dan manusia yang besar, yang mendukung berbagai sektor pembangunan, termasuk keuangan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai Belanja Modal Memoderasi Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah di Provinsi Lampung, yang mencakup 13 kabupaten, 2 kota, dan 1 Provinsi pada tahun 2022-2024. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu jumlah seluruh populasi yang ada sebanyak 16 Kabupaten/Kota beserta Provinsinya. Penelitian ini Berikut ini tabel dari hasil pemilihan sampel dalam penelitian ini.

Tabel 4. 1 Hasil Pemilihan Sampel

No	Keterangan	Jumlah
1	Kabupaten yang ada di Provinsi Lampung	13
2	Kota yang ada di Provinsi Lampung	2
3	Provinsi Lampung	1
Jumlah Kabupaten/Kota yang digunakan		16
Jumlah sampel data keseluruhan (16 x 3 tahun)		48

Sumber : Hasil olah data sekunder

Pada tabel 4.1 diatas diketahui bahwa jumlah Kabupaten/Kota serta Provinsi yang ada di Lampung tahun 2022-2024 sebanyak 16 Kabupaten/Kota. Dengan jumlah sampel data 48 sampel.

4.2 Hasil Analisis Data

4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis Statistik Deskriptif pada penelitian ini untuk menguji berapakah jumlah sampel pada penelitian, nilai minimum, nilai maksimum, nilai mean, dan nilai standar deviasi dengan variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Kinerja Keuangan, dan Belanja Modal. Informasi yang dibutuhkan dalam peneitian ini adalah data sekunder yang didapat dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Dearah yang ada di Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung pada Tahun 2022-2024. Hasil dari analisis statistik deskriptif dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 4. 2 Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std.Deviation
Kinerja Keuangan	48	72,97	123,66	100,5850	8,07095
Pendapatan Asli Daerah	48	2,69	55,83	13,1967	13,28386
Dana Perimbangan	48	43,68	89,48	77,6435	12,32529
Belanja Modal	48	7,63	28,27	13,5469	4,08189
Valid N (listwise)	48				

Sumber : Hasil Olah Data SPSS Ver 26

Berdasarkan Tabel 4.2 diatas, analisis statistik deskriptif yang telah dilakukan dapat diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Variabel X1 dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari penerimaan pemerintah daerah yang berupa pajak daerah, retribusi daerah, dan kekayaan daerah yang dikelola

sehingga menghasilkan penerimaan daerah. Variabel Pendapatan Asli Daerah (X1) memiliki nilai maksimum sebesar 55,83 Yang terletak pada Provinsi Lampung dan minimum sebesar 2,69 yang terletak pada kabupaten Pesisir Barat Mean atau rata rata variabel Pendapatan Asli Daerah (X1) sebesar 13,1967 dan Standar Deviasi sebesar 13,28386.

2. Variabel X2 dalam penelitian ini adalah Dana Perimbangan. Dana Alokasi Umum diperoleh dari dana yang dialokasikan oleh pemerintah yang dapat digunakan untuk perbaikan infrastruktur dan lain sebagainya yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Dana Perimbangan memiliki nilai maksimum sebesar 89,48 yang terletak pada Kabupaten Lampung Timur dan minimum sebesar 43,68 yang terletak pada Provinsi Lampung. Mean atau rata rata variabel Dana Perimbangan sebesar 77,6435 dan Standar Deviasi sebesar 12,32529.
3. Variabel Y dalam penelitian ini adalah Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Belanja modal dapat diukur dengan belanja modal tanah, belanja modal mesin dan peralatan, belanja modal gedung dan bangunan dan belanja modal fisik lainnya. Kinerja Keuangan Pemerintah memiliki nilai maksimum sebesar 123,66 Yang terletak pada Kabupaten Lampung Timur dan minimum sebesar 72,97 yang terletak pada Kota Bandar Lampung. Mean atau rata rata variabel Kinerja keuangan sebesar 100,5850 dan Standar Deviasi sebesar 8,07095.
4. Variabel Z dalam penelitian ini adalah Belanja Modal. Belanja Modal memiliki nilai maksimum sebesar 28,27 yang terletak pada Kabupaten Pesisir Barat dan minimum sebesar 7,63 yang terletak pada Kabupaten Lampung Utara. Mean atau rata rata Variabel Belanja Modal (Z) sebesar 13,5469 dan Standar Deviasi sebesar 4,08189.

4.2.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik bertujuan untuk memastikan agar model yang digunakan untuk bahan penelitian sudah memenuhi asumsi dasar dalam menganalisis regresi yang didalamnya terdapat uji sebagai berikut :

4.2.2.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas dalam penelitian ini menggunakan metode *kolmogorov-smirnov* dengan syarat sebagai berikut :

1. Jika nilai sig < 0,05 maka data tidak terdistribusi secara normal.
2. Jika nilai sig > 0,05 maka data berdistribusi secara normal .

Hasil dari uji normalitas dapat dengan tabel berikut ini :

Tabel 4. 3 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		48
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	7.42838618
Most Extreme Differences	Absolute	.115
	Positive	.115
	Negative	-.108
Test Statistic		.115
Asymp. Sig. (2-tailed)		.129 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber : Hasil Olah Data SPSS Ver 26

Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode *kolmogorov-smirnov*. Hasil dari uji normalitas dengan metode *kolmogorov-*

smirnov telah dicantumkan pada tabel diatas, menunjukkan bahwa tingkat signifikan *kolmogorov-smirnov* sebesar 0,129. Dengan hasil yang telah diperoleh tersebut maka dapat dilihat bahwa angka signifikan (sig) untuk variabel dependen pada uji *kolmogov-smirnov* diperoleh $0,129 > 0,05$ artinya data sampel terdistribusi secara normal.

4.2.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi atau hubungan yang kuat antara sesama variabel independen, dengan syarat sebagai berikut :

1. Jika nilai VIF kurang dari 10 atau nilai tolerance $> 0,01$ maka tidak ada multikolinearitas diantara variabel independennya.
2. Jika nilai VIF lebih dari 10 atau nilai tolerance $< 0,01$ maka menunjukkan adanya multikolinearitas diantara variabel independennya.

Hasil uji multikolinearitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 4 Uji Multikolinearitas

Model	Coefficients ^a						
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	105.438	18.482		5.705	.000		
Pendapatan Asli Daerah	-.214	.181	-.352	-1.181	.244	.216	4.626
Dana Perimbangan	.010	.197	.016	.052	.959	.212	4.707
Belanja Modal	-.209	.280	-.106	-.747	.459	.963	1.038

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

Sumber : Hasil Olah Data SPSS Ver 26

Berdasarkan uji multikolinearitas yang telah dilakukan maka diperoleh hasil yang telah di cantumkan pada tabel diatas. Maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Hasil Uji pada tabel tersebut diperoleh hasil bahwa variabel PAD (X1) memiliki nilai tolerance sebesar 0,216 dan nilai VIF sebesar 4,626.
2. Hasil uji pada tabel tersebut diperoleh hasil bahwa variabel Dana Perimbangan memiliki nilai tolerance sebesar 0,212 dan nilai VIF sebesar 4,707.
3. Hasil Uji pada tabel tersebut diperoleh hasil bahwa variabel Belanja Modal memiliki nilai tolerance sebesar 0,963 dan nilai VIF sebesar 1,038.

Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat korelasi antar variabel atau tidak terjadi multikolinearitas variabel independen dalam model regresi.

4.2.2.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk memastikan bahwa tidak terdapat hubungan antara kesalahan pengganggu pada suatu periode dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya dalam analisis regresi (Ghozali, 2018). Uji autokorelasi dalam model regresi melalui *uji Durbin Watson (DW test)* memiliki syarat sebagai berikut :

1. Jika d lebih kecil atau lebih besar dari $(4-d_u)$ maka hipotesis nol ditolak
2. Jika d terletak diantara d_u dan $(4-d_u)$, maka hipotesis nol diterima yang artinya tidak ada autokorelasi
3. Jika d terletak diantara d_l dan d_u diantara $(4-d_u)$ dan $4(-d_l)$ maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.

Tabel 4. 5 Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.404 ^a	.164	.105	7.47571	1.715

a. Predictors: (Constant), LAG_Z, LAG_X1, LAG_X2

b. Dependent Variable: LAG_Y

Sumber : Hasil Olah SPSS Ver 26

Hasil uji autokorelasi pada tabel diatas menunjukkan nilai *Durbin Watson* sebesar 1,715. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai d terletak sdiantara du dan (4-du). Dimana $1,6708 < 1,715 < 2,3292$, maka berarti bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat autokorelasi positif maupun negatif pada model regresi tersebut.

4.2.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi tidak terjadi kesamaan residual dari satu periode ke periode lain. Apabila suatu penelitian tidak ada heteroskedastisitas atau homoskedastisitas di suatu model regresi dapat dikatakan model regresi penelitian tersebut baik.dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas apabila nilai signifikan $> 0,05$ (Ghozali, 2018)

Tabel 4. 6 Uji Heteroskedastisitas

			Correlations			
			Pendapa tan Asli Daerah	Dana Perimba ngan	Belanja Modal	Unstand ardized Residual
Spearman 's rho	Pendapatan Asli Daerah	Correlation Coefficient	1.000	-.638**	-.053	.156
		Sig. (2-tailed)	.	.000	.720	.289
		N	48	48	48	48
	Dana Perimbangan	Correlation Coefficient	-.638**	1.000	-.085	-.120
		Sig. (2-tailed)	.000	.	.566	.415
		N	48	48	48	48
	Belanja Modal	Correlation Coefficient	-.053	-.085	1.000	.096
		Sig. (2-tailed)	.720	.566	.	.515
		N	48	48	48	48
	Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	.156	-.120	.096	1.000
		Sig. (2-tailed)	.289	.415	.515	.
		N	48	48	48	48

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : Hasil Olah SPSS Ver 26

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan hasil yang diperoleh dari uji heteroskedastisitas adalah sebagai berikut :

1. Pada variabel PAD diperoleh nilai Sig. (2-tailed) sebesar $0,289 > 0,05$ yang berarti bahwa variabel PAD terhindar dari gejala heteroskedastisitas.
2. Pada variabel Dana Perimbangan diperoleh nilai Sig. (2-tailed) sebesar $0,415 > 0,05$ yang berarti bahwa variabel Dana Perimbangan terhindar dari segala heteroskedastisitas.
3. Pada variabel Belanja Modal diperoleh nilai Sig. (2-tailed) sebesar $0,515 > 0,05$ yang berarti bahwa variabel Dana Perimbangan terhindar dari segala heteroskedastisitas.

Karena nilai signifikansi (Sig. 2-tailed) seluruh variabel independen terhadap residual lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut memenuhi syarat terhindar dari heteroskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.2.3 Uji Analisis Regresi Moderasi

Uji *Moderated Regression Analysis* (MRA) dilakukan untuk mengetahui apakah variabel moderating memperkuat atau memperlemah hubungan antar variabel independen (Ghozali, 2018) . Hasil uji *Moderated Regression Analysis* (MRA) dapat dilihat pada tabel 4.7.

Tabel 4. 7 Analisis Regresi Moderasi

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	72.935	10.986		6.639	.000
	LAG_X1	.459	.254	.726	1.811	.077
	LAG_X2	-.022	.166	-.032	-.131	.897
	PAD*BM	-.055	.016	-1.179	-3.551	.001
	DP*BM	.006	.005	.180	1.195	.239

a. Dependent Variable: LAG_Y

Sumber : Hasil Olah SPSS Ver 26

Berdasarkan tabel diatas diketahui persamaan regresi adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_1 Z + \beta_4 X_2 Z + \varepsilon$$

Berdasarkan persamaan regresi diatas diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Nilai Konstanta sebesar 72,935 yang berarti bahwa jika variabel independen bernilai nol, maka Kinerja Keuangan adalah 72,935.
2. Nilai Koefisien Regresi variabel Pendapatan Asli Daerah (X1) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 0,459 nilai ini menunjukkan bahwa setiap penurunan/peningkatan X1 sebesar 1 satuan diprediksi akan meningkatkan (+) Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 0,459.
3. Nilai Koefisien Regresi variabel Dana Perimbangan (X2) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sebesar -0,022 nilai ini menunjukkan bahwa setiap penurunan/peningkatan X2 sebesar 1 satuan diprediksi akan menurunkan (-) Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sebesar -0,022.
4. Nilai Koefisien Regresi variabel Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sebesar -0,055 nilai ini menunjukkan bahwa setiap penurunan/peningkatan Pendapatan Asli

Daerah dengan Belanja Modal sebesar 1 satuan diprediksi akan menurunkan (+) Kinerja Keuangan Pemerintah sebesar -0,055.

5. Nilai Koefisien Regresi variabel Dana Perimbangan dengan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 0,006 nilai ini menunjukkan bahwa setiap penurunan/peningkatan Dana Perimbangan dengan Belanja Modal sebesar 1 satuan diprediksi akan meningkatkan (+) Kinerja Keuangan Pemerintah sebesar 0,006.

4.3 Pengujian Hipotesis

4.3.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji Koefisien Determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah nol (0) dan satu (1). Apabila nilai R^2 kecil, itu artinya kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Namun jika nilai R^2 mendekati angka satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2018). Hasil uji koefisien determinasi (R^2) dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 8 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.586 ^a	.344	.281	6.69934

a. Predictors: (Constant), DP*BM, PAD*BM, LAG_X2, LAG_X1

Sumber : Hasil Olah SPSS Ver 26

Berdasarkan tabel diatas telah diperoleh hasil dari nilai R Square untuk variabel Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Perimbangan (X2) dan Belanja Modal (Z) diperoleh sebesar 0,344 Hal ini berarti bahwa sebesar 34,4 % dari Kinerja Keuangan Pemerintah dapat dijelaskan oleh variabel independen Pendapatan

Asli Daerah (X1), Dana Perimbangan (X2), dan Belanja Modal dalam model tersebut, sedangkan sisanya sebesar 65,6 % dijelaskan oleh variabel lain.

4.3.2 Uji Kelayakan Model (Uji f)

Uji Kelayakan Model atau Uji f bertujuan untuk menguji apakah model regresi yang digunakan sudah layak atau tidak digunakan. Layak (andal) disini maksudnya adalah model yang diestimasi layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terkait dengan syarat sebagai berikut :

1. Jika f hitung lebih besar dari f tabel atau probabilitas lebih kecil daripada tingkat signifikansi ($\text{sig} < 0,05$), maka model penelitian ini dapat digunakan atau sudah layak.
2. Jika f hitung lebih kecil dari f tabel atau probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansi ($\text{sig} > 0,05$) maka model tidak dapat digunakan atau tidak layak.

Berikut merupakan hasil dari uji kelayakan model atau uji f dengan SPSS ver 26:

Tabel 4. 9 Uji f

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	988.011	4	247.003	5.503	.001 ^b
	Residual	1885.009	42	44.881		
	Total	2873.020	46			

a. Dependent Variable: LAG_Y

b. Predictors: (Constant), DP*BM, PAD*BM, LAG_X2, LAG_X1

Sumber : Hasil Olah SPSS Ver 26

Berdasarkan uji f yang telah dilakukan, pada tabel diatas diperoleh hasil bahwa uji f memiliki nilai signifikansi sebesar 0,001 yang berarti $\text{sig} < 0,05$ atau 0,001 $< 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Perimbangan (X2), dan Belanja Modal (Z) secara bersama sama berpengaruh

signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dan model dalam penelitian ini layak untuk digunakan.

4.3.3 Uji Hipotesis (Uji t)

Uji t bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen dengan tingkat signifikan 0,05. Apabila nilai signifikan $t < 0,05$ maka terdapat pengaruh antara satu variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Hasil Perhitungan uji t dapat dilihat dalam tabel berikut dibawah ini :

Tabel 4. 10 Uji t

		Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	72.935	10.986		6.639	.000
	LAG_X1	.459	.254	.726	1.811	.077
	LAG_X2	-.022	.166	-.032	-.131	.897
	PAD*BM	-.055	.016	-1.179	-3.551	.001
	DP*BM	.006	.005	.180	1.195	.239

a. Dependent Variable: LAG_Y

Sumber : Hasil Olah SPSS Ver 26

Berdasarkan hasil uji statistik t pada tabel tersebut terdapat t hitung untuk setiap variabel sedangkan t tabel diperoleh melalui tabel t ($\alpha = 5\%$ atau 0,05).

1. Hasil untuk variabel Pendapatan Asli Daerah (X1) dengan Belanja Modal (Z) menunjukkan bahwa nilai signifikan $0,001 < 0,05$ maka jawaban hipotesis yaitu H_{a3} diterima dan menolak H_{o3} yang menyatakan bahwa Belanja Modal mampu memperkuat pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Hasil untuk Dana Perimbangan (X2) dengan Belanja Modal (Z) menunjukkan bahwa nilai signifikan $0,239 > 0,05$ maka jawaban hipotesis yaitu H_{a4} ditolak dan menerima H_{o4} yang menyatakan bahwa Belanja Modal

tidak dapat memperkuat pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

4.4 Pembahasan

Penelitian ini merupakan studi untuk mengetahui Belanja Modal memoderasi Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Provinsi Lampung) tahun 2022-2024. Berdasarkan uji hipotesis di atas, dapat diketahui bahwa variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan Dana Perimbangan tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan Variabel Moderasi yaitu Belanja Modal mampu memperkuat pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Sedangkan Belanja Modal tidak mampu memperkuat Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

4.4.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hipotesis yang pertama pada penelitian ini yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa hipotesis pertama (H_{a1}) ditolak. Dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 2022-2024.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah karena pemerintah daerah belum mampu mengoptimalkan potensi PAD yang ada, sehingga meskipun penerimaan PAD meningkat, hal tersebut tidak cukup kuat untuk memperbaiki kinerja keuangan. Sebagian besar daerah di Provinsi Lampung masih memiliki rasio desentralisasi

fiskal dan kemandirian daerah yang rendah, yang berarti ketergantungan pada dana transfer pusat tetap tinggi (Handayani & Muzdalifah, 2024). Dengan kata lain, PAD yang diperoleh belum memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

Pendapatan Asli Daerah sejatinya mencerminkan tingkat kemandirian fiskal suatu daerah. Namun, realitas di Provinsi Lampung memperlihatkan bahwa kontribusi PAD masih relatif kecil dibandingkan dengan total penerimaan daerah, sehingga belum cukup kuat untuk mendorong peningkatan kinerja keuangan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, PAD berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah (Undang-Undang Nomor 1 Tahun, 2022). Namun, potensi tersebut belum tergali secara optimal, sehingga perannya terhadap peningkatan kinerja keuangan daerah masih terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah di Provinsi Lampung masih menghadapi kendala dalam menggali sumber-sumber pendapatan lokal. Tingginya ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat menyebabkan PAD tidak menjadi faktor dominan dalam menentukan kinerja keuangan.

Jika dikaitkan dengan teori *Stewardship*, seharusnya pemerintah daerah sebagai *steward* (pengelola) memiliki orientasi untuk bertindak demi kepentingan masyarakat dengan mengoptimalkan potensi sumber daya lokal. *Stewardship theory* menekankan bahwa aparatur pemerintah bukanlah sekadar agen yang berorientasi pada kepentingan pribadi, tetapi sebagai pengelola yang memiliki tanggung jawab moral untuk meningkatkan kesejahteraan publik (Davis et al., 1997). Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran *stewardship* belum tercermin secara optimal, karena peningkatan PAD belum mampu meningkatkan kinerja keuangan daerah. Hal ini bisa disebabkan oleh lemahnya komitmen dalam pengelolaan PAD, kurangnya inovasi kebijakan, serta belum maksimalnya akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan PAD. Dengan

demikian, meskipun secara teoritis PAD diharapkan mampu memperkuat kinerja keuangan pemerintah daerah sesuai prinsip stewardship, pada praktiknya hal tersebut belum tercapai di Provinsi Lampung. Peningkatan PAD perlu dibarengi dengan tata kelola yang lebih baik, transparan, dan akuntabel agar benar-benar dapat meningkatkan kinerja keuangan sekaligus mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan beberapa penelitian terdahulu yang menyimpulkan bahwa PAD tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini menegaskan bahwa peningkatan PAD tidak otomatis memperbaiki kinerja keuangan, karena efektivitas pengelolaan anggaran, kualitas belanja, serta penerapan prinsip stewardship dalam birokrasi daerah juga sangat menentukan. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Ratnasari & Meirini, (2023); Putri & Darmayanti, (2019) yang menyatakan bahwa PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

4.4.2 Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan, diketahui bahwa Dana Perimbangan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 2022-2024. Hasil ini menunjukkan bahwa besarnya dana perimbangan yang dialokasikan dari pemerintah pusat belum mampu secara langsung meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, hipotesis kedua (H_{a2}) yang menyatakan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan ditolak, dan hipotesis nol (H_0) diterima.

Dana Perimbangan sejatinya dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, serta untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) (Undang-Undang Nomor 1 Tahun, 2022). Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa ketergantungan yang tinggi terhadap Dana Perimbangan justru belum mampu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara signifikan.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa alokasi Dana Perimbangan lebih banyak digunakan untuk belanja rutin, seperti belanja pegawai dan operasional pemerintahan, sehingga kontribusinya terhadap peningkatan kinerja keuangan menjadi rendah. Hal ini memperlihatkan bahwa keberadaan Dana Perimbangan belum sepenuhnya mendorong kemandirian fiskal daerah. Sebaliknya, pemerintah daerah menjadi kurang terdorong untuk menggali potensi pendapatan asli daerah secara maksimal.

Jika dikaitkan dengan teori *Stewardship*, seharusnya pemerintah daerah sebagai *steward* mengelola Dana Perimbangan secara efektif dan efisien demi kepentingan masyarakat luas. *Stewardship theory* menekankan pentingnya komitmen moral pengelola untuk bertindak transparan dan akuntabel dalam memanfaatkan sumber daya publik. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran *stewardship* belum optimal, karena meskipun Dana Perimbangan cukup besar, pemanfaatannya belum diarahkan secara produktif untuk meningkatkan kinerja keuangan. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya inovasi dalam perencanaan anggaran, dominasi belanja rutin yang tinggi, serta lemahnya pengawasan terhadap efektivitas penggunaan dana transfer tersebut.

Dengan demikian, meskipun secara teoritis Dana Perimbangan diharapkan dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah dan meningkatkan kinerja keuangan, pada praktiknya hal tersebut belum tercapai di Provinsi Lampung. Agar Dana Perimbangan dapat berkontribusi nyata terhadap kinerja keuangan, diperlukan pengelolaan yang lebih terarah pada belanja produktif, peningkatan transparansi, serta sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam perencanaan pembangunan.

Dana perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah karena tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana dari pemerintah pusat. Ketergantungan ini membuat pemerintah daerah kurang memiliki kemandirian fiskal dan cenderung mengandalkan dana transfer pusat untuk membiayai operasionalnya. Akibatnya, pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja keuangan daerah menjadi kurang nyata dan tidak berdampak signifikan. Dalam konteks ini, dana perimbangan justru dapat memperlemah kemandirian fiskal daerah karena pemerintah daerah kurang terdorong untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pendapatan yang lebih mandiri (Ramadani & Muslimin, 2022).

Dalam pembahasan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, dapat dijelaskan bahwa hal ini kemungkinan disebabkan oleh pemanfaatan dana perimbangan yang kurang efektif. Penggunaan dana yang tidak tepat sasaran, bersifat konsumtif, dan spekulatif mengakibatkan menurunnya produktivitas dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga dana perimbangan tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Selain itu, ketergantungan pemerintah daerah yang tinggi terhadap pemerintah pusat tercermin dari besar dananya yang bersumber dari transfer pusat, sehingga kapasitas daerah dalam mengelola sumber pendapatan asli masih sangat rendah. Kondisi ini menyebabkan kemandirian keuangan daerah menjadi rendah dan kinerja keuangan daerah sulit meningkat meskipun alokasi dana perimbangan besar. Dengan kata lain, dana perimbangan seharusnya berfungsi sebagai alat untuk mendukung desentralisasi fiskal dan menciptakan keseimbangan fiskal antara pusat dan daerah, namun pemanfaatannya yang kurang optimal menyebabkan dana ini tidak berpengaruh terhadap peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah (Rahayu et al., 2023).

Kaitannya dengan teori *stewardship*, pemerintah daerah sebagai steward memiliki tanggung jawab untuk mengelola dana dengan efektif, efisien, dan akuntabel demi kepentingan masyarakat (principal) (Donaldson & Davis, 1991).

Namun, ketergantungan yang tinggi pada dana perimbangan dan kurang optimalnya pengelolaan dana tersebut menunjukkan kegagalan *steward* dalam menjalankan perannya secara maksimal. *Stewardship theory* menegaskan bahwa pemegang amanah harus bertindak demi kepentingan terbaik *principal*, tetapi dalam situasi dana perimbangan yang tidak berpengaruh, pemerintah daerah tampak belum mengelola sumber daya keuangan dengan penuh tanggung jawab dan mandiri, sehingga kinerja keuangan tidak meningkat secara signifikan.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rahayu et al., 2023; Ramadani & Muslimin, 2022; Ratnasari & Meirini, 2023; Simamora & Budiwitjaksono, 2022; Yudiastuti et al., 2025) yang menyatakan dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut kemungkinan karena pemanfaatan dana perimbangan yang kurang efektif, disini penggunaan yang tidak tepat sasaran, bersifat konsumtif dan spekulatif, sehingga menurunkan produktivitas dalam peningkatan PAD kemudian meningkatkan ketergantungan terhadap pihak lain terutama pemerintah pusat dan menyebabkan dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

4.4.3 Belanja Modal Memoderasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil pengujian statistik terhadap variabel interaksi antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal, diperoleh nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel interaksi memiliki nilai signifikan, sehingga hipotesis ketiga (H_{a3}) yang menyatakan bahwa belanja modal memoderasi pengaruh PAD terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah diterima. Dengan kata lain, belanja modal mampu memperkuat atau memperlemah hubungan antara PAD dan kinerja keuangan, yang berarti pengaruh PAD terhadap kinerja keuangan tergantung pada besar kecilnya belanja modal. Temuan ini sesuai dengan hipotesis awal yang menyatakan bahwa belanja modal akan memperkuat pengaruh PAD terhadap

Kinerja keuangan Pemerintah daerah. Secara teoritis, semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah yang dimiliki oleh suatu daerah dapat meningkatkan belanja modal dalam rangka pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kinerja keuangan. Berdasarkan hasil uji statistik belanja modal mampu memoderasi Pendapatan Asli Daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, yang berarti pengaruh PAD terhadap kinerja keuangan bergantung pada besar kecilnya belanja modal.

Pendapatan Asli Daerah pada dasarnya mencerminkan kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam menggali potensi sumber daya lokal untuk membiayai pembangunan. Namun, besarnya PAD tidak serta merta meningkatkan kinerja keuangan apabila penggunaannya tidak diarahkan pada belanja yang produktif. Dalam konteks ini, belanja modal berperan penting sebagai instrumen untuk memperkuat hubungan antara PAD dan kinerja keuangan. Belanja modal yang dialokasikan untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor strategis lainnya dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta memperkuat daya saing daerah.

Kondisi ini menunjukkan bahwa PAD hanya akan memberikan kontribusi nyata terhadap kinerja keuangan apabila dikelola dengan baik dan diwujudkan dalam bentuk belanja modal yang produktif. Sebaliknya, apabila PAD lebih banyak dialokasikan untuk belanja rutin, maka kontribusinya terhadap peningkatan kinerja keuangan akan terbatas. Dengan adanya belanja modal sebagai variabel moderasi, maka pemanfaatan PAD menjadi lebih efektif dalam mendorong peningkatan kinerja keuangan.

Belanja modal mampu memoderasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah karena belanja modal merupakan bentuk investasi strategis yang secara langsung meningkatkan kualitas dan efektivitas pemanfaatan PAD. Investasi pada infrastruktur publik seperti jalan, fasilitas pendidikan, dan kesehatan tidak hanya membantu memperlancar berbagai aktivitas ekonomi, tetapi juga menurunkan biaya operasional

pemerintah daerah di masa depan. Sebagai contoh, pembangunan infrastruktur yang memadai dapat mengurangi biaya transportasi dan distribusi barang, sehingga mendorong peningkatan aktivitas ekonomi yang akan berimbas pada meningkatnya penerimaan pajak dan retribusi daerah. Dengan demikian, belanja modal tidak hanya memanfaatkan PAD yang ada, tetapi juga menciptakan sumber pendapatan yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, peningkatan belanja modal selaras dengan teori *stewardship*, di mana pengelolaan yang bertanggung jawab terhadap belanja modal menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber daya untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kemandirian fiskal. Oleh karena itu, belanja modal memperkuat hubungan positif antara PAD dan kinerja keuangan pemerintah daerah dengan mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kapasitas fiskal secara berkelanjutan (Yudiastuti et al., 2025).

Jika dikaitkan dengan teori *Stewardship*, pemerintah daerah sebagai *steward* berkewajiban untuk mengelola sumber daya publik secara akuntabel dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. *Stewardship theory* menekankan bahwa pengelola (*steward*) harus menggunakan sumber daya yang dipercayakan untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, penggunaan PAD yang diarahkan pada belanja modal mencerminkan penerapan *stewardship* yang baik, karena menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Dengan demikian, belanja modal tidak hanya memperkuat pengaruh PAD terhadap kinerja keuangan, tetapi juga mewujudkan tanggung jawab moral pemerintah daerah sebagai *steward*.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa belanja modal berperan dalam memperkuat hubungan antara sumber penerimaan daerah dengan kinerja keuangan pemerintah daerah. Temuan ini menegaskan bahwa optimalisasi belanja modal merupakan kunci penting agar PAD benar-benar berkontribusi terhadap peningkatan kinerja keuangan daerah secara berkelanjutan.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa belanja modal mampu memoderasi hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dan kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Hajar et al., 2024; Yudiastuti et al., 2025) yang menyatakan bahwa belanja modal memoderasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

4.4.4 Belanja Modal Memoderasi pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hasil pengujian statistik, diketahui bahwa nilai koefisien untuk variabel interaksi antara Dana Perimbangan dan Belanja Modal adalah 0,239, yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian, hipotesis keempat (H_{a4}) yang menyatakan bahwa belanja modal memoderasi pengaruh Dana Perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah ditolak. Artinya, belanja modal tidak mampu memperkuat atau melemahkan hubungan antara Dana Perimbangan dan kinerja keuangan. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap kinerja keuangan berjalan secara langsung, tidak tergantung pada besar atau kecilnya belanja modal yang dikeluarkan oleh daerah..

Dana Perimbangan pada dasarnya dirancang untuk mendukung pemerataan pembangunan antar daerah, mengurangi kesenjangan fiskal, serta membantu daerah yang memiliki keterbatasan fiskal dalam membiayai kebutuhan pembangunan. Akan tetapi, kenyataan di lapangan memperlihatkan bahwa sebagian besar Dana Perimbangan masih dialokasikan untuk belanja rutin, seperti belanja pegawai dan biaya operasional, sehingga penggunaannya tidak produktif dalam meningkatkan kinerja keuangan. Akibatnya, meskipun belanja modal dialokasikan, keberadaannya tidak cukup kuat untuk memperkuat hubungan antara Dana Perimbangan dan kinerja keuangan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa belanja modal di Provinsi Lampung belum sepenuhnya dimanfaatkan secara strategis untuk mendorong efektivitas

penggunaan Dana Perimbangan. Idealnya, belanja modal dapat memperkuat kontribusi Dana Perimbangan terhadap kinerja keuangan dengan cara mengubah transfer dana dari pusat menjadi investasi pembangunan daerah. Namun, hasil penelitian ini justru mengindikasikan bahwa belanja modal yang ada belum produktif, atau bahkan cenderung kurang proporsional, sehingga gagal berperan sebagai variabel moderasi.

Jika dikaitkan dengan teori *Stewardship*, seharusnya pemerintah daerah sebagai *steward* mampu mengelola Dana Perimbangan dan belanja modal secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Stewardship theory* menekankan bahwa steward memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk menggunakan sumber daya yang dipercayakan dengan cara yang produktif dan berorientasi pada kepentingan publik. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip *stewardship* belum terwujud optimal, karena interaksi antara Dana Perimbangan dan belanja modal tidak mampu meningkatkan kinerja keuangan daerah. Hal ini dapat disebabkan oleh lemahnya perencanaan pembangunan, rendahnya inovasi kebijakan, serta belum maksimalnya pengawasan terhadap efektivitas penggunaan dana transfer dan belanja modal.

Dengan demikian, meskipun secara teoritis belanja modal diharapkan dapat memperkuat pengaruh Dana Perimbangan terhadap kinerja keuangan daerah, pada praktiknya hal tersebut belum tercapai di Provinsi Lampung. Agar belanja modal dapat berperan lebih efektif, diperlukan perencanaan yang lebih matang, pengalokasian yang tepat sasaran, serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap penggunaan anggaran.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan temuan beberapa penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa Dana Perimbangan seringkali hanya digunakan untuk belanja rutin dan tidak produktif, sehingga belanja modal tidak mampu memperkuat pengaruhnya terhadap kinerja keuangan daerah. Hal ini menegaskan bahwa besarnya Dana Perimbangan maupun adanya alokasi belanja

modal tidak otomatis berdampak pada peningkatan kinerja keuangan, apabila tidak dikelola secara efektif sesuai prinsip *stewardship*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belanja modal tidak memperkuat pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan kata lain, dapat dinyatakan bahwa dengan ataupun tidak adanya belanja modal dana perimbangan tetap berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini sejalan dengan penemuan yang dilakukan oleh (Hajar et al., 2024; Noeng et al., 2023) yang menyatakan bahwa dana perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.